

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah politik pertanian di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini memberi pembelajaran penting bagi politik pertanian kedepan. Salah satunya adalah bahwa tekanan politik dapat merubah politik dan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, politik tanam paksa (*culturestelsel*) pada 1830 dilatar belakangi politik agrarian (*Agrarische wet*) pada 1870 dilatarbelakangi oleh tekanan pengusaha swasta untuk dapat membangun bisnis pertanian di wilayah koloni.

Masalah utama yang dihadapi oleh setiap Negara agraris adalah ketika manusia membutuhkan tanah dan hasilnya untuk kelangsungan hidup, membutuhkan tanah untuk tempat hidup dan usaha, bahkan sesudah meninggalpun masih membutuhkan sejenkal tanah. Sehubungan dengan luas tanah dalam Negara itu terbatas, terlebih ketika membicarakan lahan pertanian padahal jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah. Oleh karena itu masalah utama yang harus dihadapi oleh Negara yang mengaku agraris adalah mengingat keadaan alam dan luas tanah dalam Negara, dalam hubungannya dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, bagaimana cara memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengushakan mengurus dan membagi tanah serta hasilnya sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat dan Negara.

Kebijakan pertanian mempengaruhi kehidupan semua orang, termasuk kesejahteraannya. Reaksi setiap orang terhadap suatu kebijakan akan berbeda-beda tergantung pada keadaan masing-masing dan dampak kebijakan tersebut pada pendapatan, kekayaan, dan kepentingan lainnya. Mempelajari politik pertanian akan dapat memperluas dan mempertajam wawasan dan analisis dalam ikut memikirkan pemilihan atas berbagai alternatif kebijakan.

Meskipun secara umum kebijakan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi, tetapi untuk komoditas tertentu dengan permintaan yang inelastic, kebijakan pertanian justru diarahkan untuk membatasi produksi agar kesejahteraan masyarakat tidak turun. Oleh karena itu, kriteria suatu kebijakan termasuk kebijakan-kebijakan pertanian seharusnya dinilai dari *economic welfare*, baik dengan *pareto optimum* maupun ditinjau dari *producer surplus*, *consumer surplus*, dan pengeluaran pemerintah. Jadi, Nampak disini bahwa elastisitas permintaan dapat digunakan sebagai suatu parameter untuk menentukan kebijakan yang perlu diambil, ditinjau dari kesejahteraan ekonomi. (Widodo, 2012:1-2).

Politik pertanian dapat merupakan bagian dari politik ekonomi sector pertanian sebagai salah satu sektor dalam ekonomi, meskipun pertanian tidak hanya dilihat dari sektor ekonomi saja. Jadi politik pertanian atau *agricultural policy* merupakan sikap dan tindakan pemerintah dari sektor pertanian. Politik pembangunan pertanian akan berusaha untuk dapat mendorong dan mempercepat proses pembangunan pertanian. Perumusan dan juga pelaksanaan dalam proses pertanian selalu berhubungan erat dengan pemerintahan, oleh

karena itu aspek politik selalu berperan karena bagaimapun kebijakan pemerintah selalu tidak terlepas dari berbagai kepentingan politik yang harus diperhitungkan oleh pemerintah dengan system pemerintahannya.

Di sektor pertanian pelayanan untuk masyarakat tani juga diurus oleh pemerintah, meskipun yang melaksanakan dapat juga perusahaan, swasta, koperasi atau badan pemerintahan seperti kredit produksi, penyuluhan, penelitian, penyediaan input, *soil conservation* (penghijauan, terasering, dan sebagainya). (Widodo,2012:28-29).

Orang selalu dihadapkan kepada dua kenyataan yaitu adanya sentralisasi kekuasaan disatu pihak, dan dilain pihak secara terpisah selalu berhubungan dengan kekuasaan badan atau organisasi/lembaga seperti dinas, badan usaha, kelompok tani dan sebagainya. (Widodo,2012:37).

Semua rekomendasi dari kebijakan menyangkut *value* atau norma masyarakat, yang memperhatikan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Value atau norma ini tergantung pada *belief* atau kepercayaan/faham, yang dipegang oleh masyarakat tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Value atau norma dan faham ini memberikan landasan untuk tujuan kebijakan yang dibuat.

Kebijakan pada umumnya berkaitan dengan kearifan (*wisdom*) dalam menangani peristiwa berdasar suatu rencana dan program tertentu yang disusun melalui proses pemikiran dan berdasar alasan, melibatkan berbagai pihak secara rasional, baik perorangan, keluarga, perusahaan, organisasi, gerakan politik maupun badan-badan pemerintah. Kebijakan meliputi perencanaan berdasar

faham, norma dan tujuan tertentu dengan memperhatikan sumberdaya yang ada, manfaat dan biaya atau pengorbanan. Unsur kebijakan meliputi tujuan (*means*), *implements* (alat), dan kendala (*constraints*), (Hacrow,1984). (Widodo,2012:43).

Jadi tujuan kebijakan itu bertingkat-tingkat. Tujuan yang bersifat umum dari kebijakan-kebijakan suatu Negara merupakan tujuan Negara. Tujuan umum ini diperinci dalam beberapa sektor, seperti halnya dalam sektor pertanian dan juga dari sektor masing-masing kehidupan. Tujuan kebijakan ekonomi secara umum, seperti kebijakan moneter, dapat dirumuskan, tetapi mungkin masih dilengkapi dengan rincian tujuan ekonomi dari masing-masing sektor ekonomi yang dapat merupakan bagian yang lebih khas dan terinci dari perumusan kebijakan ekonomi dari suatu sektor tertentu. (Widodo,2012:45-46).

Besarnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh berbagai pertumbuhannya. Pertumbuhan tingkat penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, mortalitas, dan migrasi. Mortalitas dipengaruhi oleh *sanitary* dan kemajuan ilmu pengetahuan dan serta standar hidup. Mortalitas ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan bahan makanan sehingga inovasi pertanian juga dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Permintaan hasil untuk *eksport* dipengaruhi oleh keadaan ekonomi Negara pengimpor dan adanya *trade barrier*, baik *tariff* maupun *non-tariff*. (Widodo,2012: 115).

Ketidakseimbangan akses terhadap sumberdaya menyebabkan kelangkaan atau penurunan sumberdaya tersebut, yang kemudian akan memicu lebih banyak akibat lagi. (Mitchel,2016:11). Seperti yang terjadi akhir-akhir ini

di Kota Tasikmalaya, masyarakat dan juga mahasiswa menggelar demo bersama terkait lokasi titik pertambangan ilegal di Aboh, menjadi salah satu hal yang diadukan kepada Polres Tasikmalaya Kota. Hal ini disebabkan oleh kegiatan galian ilegal yang dilakukan di Aboh, tepatnya di gunung pameongan sudah dilaksanakan sejak juli 2019. Gunung pameongan dipermasalahkan masyarakat karena menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau.

Didalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa dari rencana Peraturan Daerah tersebut adalah untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sector, antar wialayah, dan

antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Kota Tasikmalaya, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Berdasarkan arahan dari RT/RW yang berada didalam Perda Kota Tasikmalaya nomor 4 tahun 2012 paragraf 7 pasal 49 ayat 2 kawasan pertanian di Kota Tasikmalaya meliputi area seluas 492 hektar, tersebar didalam 4 kecamatan yaitu wilayah kecamatan cibereum, kecamatan mangkubumi, kecamatan purbaratu, dan juga kecamatan kawalu.

Pergeseran alih fungsi lahan pertanian ini memang tidak bisa dipungkiri lagi, menurut sumber yang sudah diwawancarai (Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya) memang mengakui bahwa saat ini Kota Tasikmalaya sedang

mengalami krisis lahan pertanian akibat dialihfungsikannya lahan pertanian kedalam bentuk bangunan.

Dampak negative dari konversi lahan/alih fungsi lahan pertanian adalah bisa menyebabkan berkurangnya lahan pertanian, hal itu disebabkan karena lahan yang tadinya dipergunakan untuk lahan pertanian diubah menjadi lahan pemukiman, perhotelan, industry, dan lainnya.

Selain itu juga dapat mengurangi produksi pangan karena lahan pertanian yang semakin menipis, maka hasil dari pertanian juga akan berkurang, hal ini akan menjadi tidak seimbang jika masyarakat semakin bertambah tetapi lahan pertanian semakin sedikit otomatis akan sulit memenuhi kebutuhan pangan jika tidak disiasati dengan mendatangkan kebutuhan pangan dari daerah lain.

Selain itu juga dampak negative dari dialihfungsikannya lahan pertanian adalah dapat mengancam keseimbangan ekosistem, belum lagi sarana dan prasarana yang ditujukan untuk pertanian akan tidak terpakai, terlebih lagi akan ada banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan mereka karena disebabkan oleh lahan pertanian yang dialihfungsikan.

Ketika populasi lahan pertanian semakin menurun, tentu saja bahan pangan di pasaran akan menjadi mahal karena sulit untuk dijumpai dan stoknya tidak melimpah.

Sebagian besar lahan pertanian terletak di daerah pedesaan, jika lahan pertanian dialihfungsikan maka sebagian petani akan kehilangan pekerjaannya

bahkan juga mata pencahariannya, hal ini akan mendorong mereka untuk melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan baru.

Yusuf selaku ketua gapoktan tamansari mengatakan “masih mendapatkan keuntungan dari pertanian walaupun sedikit, itu menjadi alasan utamanya dalam mempertahankan lahan pertanian miliknya dan juga anggotanya. Yusuf bisa memahami para petani yang melepas lahan miliknya karena mungkin terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Beliau juga mengatakan yang namanya pertanian itu baik dari pertanian lahan basah ataupun kering tidak selamanya menguntungkan, apalagi pas musim kemarau, banyak tanaman pertanian yang mati/layu karena kekurangan air, bahkan pak yusuf juga mengatakan kadang juga tidak bertani pada saat musim kemarau, hal yang diharapkan oleh pak yusuf dari pemerintah Kota Tasikmalaya adalah masalah irigasi dan juga mengharapkan bantuan seperti benih padi yang bisa dipanen 1 tahun sebanyak 3 kali, dan juga mengharapkan solusi dari pemerintah pada saat musim kemarau, tanggapan pak yusuf mengenai lahan pertanian yang dijadikan bangunan semisal mall, perumahan dan lain-lain, beliau menuturkan bahwa hal itu sangat merugikan bagi petani, pak yusuf juga mengatakan kenapa pemerintah memberikan ijin kepada pengembang bangunan untuk membangun perumahan, Yusuf juga mengungkapkan bahwa hasil dari pertanian itu akan menguntungkan semua pihak, menurut Yusuf Negara kita ini miris, karena dijuluki sebagai Negara agraris tetapi kebutuhan pokok seperti beras import, hal itu menyebabkan jatuhnya harga local, mengenai untung ruginya masalah panen hal itu tergantung dengan cuaca, pola menanam dan juga pemberian pupuk”.

Menanggapi hal ini pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pertanian yang diwakili oleh Deni selaku kabid tumbuhan dan pangan menjelaskan “ bahwa memang perlu diakui saat ini Kota Tasikmalaya mengalami kekurangan lahan pertanian karena dijadikan lahan pemukiman dan sebagainya, tetapi Deni juga menyebutkan bahwa saat ini di Kota Tasikmalaya menerapkan system lahan hijau, lahan hijau tersebut berarti lahan yang tidak boleh dijadikan pemukiman atau apapun, yang berarti juga lahan hijau tersebut bisa jadi lahan untuk pertanian, hutan ataupun yang lainnya”.

Tabel 1.1 Lahan Pertanian Kota Tasikmalaya Tahun 2015

PENGUNAAN LAHAN (Ha)														LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll)**)	TOTAL WILAYAH
LAHAN PERTANIAN															
LAHAN SAWAH							LAHAN BUKAN SAWAH								
No	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Total Sawah	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Perkebunan	Hutan Rakyat	Padang Pengembalaan/ Padang rumput	Hutan Negara	Sementara tidak diusahakan	Lainnya (tambak, kolam empang, dll)	Jumlah Bukan Sawah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kawalu	969	275	1244	620	488		345				454	1907	770	3.921
2	Tamansari	482	320	802	902	380		877	20			75	2254	378	3.434
3	Cibeureum	762	25	787	163			20				130	313	361	1.461
4	Purbaratu	499		499	219	10		55			10	160	454	183	1.136
5	Tawang	87		87	4						21	19	44	402	533
6	Cihideung	72		72	10						6	56	72	387	531
7	Mangkubumi	1.108	26	1134	166	79		165				166	576	662	2.372
8	Indihiang	418		418	26			2			36	76	140	459	1.017
9	Bungursari	575	118	693	403			116				137	656	414	1.763
10	Cipedes	254		254	19						4	48	71	663	988
Jumlah		5.226	764	5.990	2.532	957	-	1.580	20	-	77	1.321	6.487	4.679	17.156

Sumber: Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya Tahun 2015

Lahan Pertanian Kota Tasikmalaya Tahun 2019

**Tabel 1.2
Data Lahan Pertanian**

No	Kecamatan	PENGUNAAN LAHAN (Ha)													Total wilayah
		LAHAN PERTANIAN												Lahan Bukan Pertanian (Jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll)**)	
		Lahan Sawah			Lahan Bukan Sawah										
		Irigasi	Tadah Hujan	Total Sawah	Tegal/Kebun	Lading/Huma	Perkebunan	Hutan Rakyat	Padang Penggem balaan/ padang rumput	Hutan Negara	Sementara tidak diusahakan	Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	Jumlah Bukan Sawah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kawalu	711	476	1.187	667	448	-	345	-	319	-	64	1.843	891	3.921
2	Tamansari	415	353	768	900	380	-	877	20	-	-	76	2.253	410	3.431
3	Cibeureum	761	25	786	163	-	-	15	-	-	-	135	313	366	1.465
4	Purbaratu	499	-	499	259	-	-	25	-	-	-	160	444	210	1.153
5	Tawang	84	-	84	4	-	-	-	-	-	21	19	44	560	688
6	Cihideung	57	-	57	12	-	-	-	-	-	15	9	36	438	531
7	Mangkubumi	1.061	26	1.087	141	104	-	165	-	-	-	166	5576	710	2.373
8	Indihiang	400	-	400	26	-	-	2	-	-	36	76	140	477	1.017
9	Bungursari	575	118	693	403	-	-	116	-	-	-	137	656	414	1.763
10	Cipedes	235	-	235	19	-	-	-	-	-	-	48	67	512	814
Jumlah		4.798	998	5.796	2.594	932	-	1.545	20	319	72	890	6.372	4.988	17.156

Sumber : Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya Tahun 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dalam uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenai alih fungsi lahan pertanian kedalam lahan non-pertanian?

C. Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah terkait krisis lahan pertanian di Kota Tasikmalaya akibat adanya kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenai Tata Ruang dan Wilayah (RT RW).

D. Tujuan Penelitian

Adapun diadakannya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menangani krisis lahan pertanian dan juga bagaimana para petani bertahan dalam krisis lahan pertanian.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan yang sangat berharga terutama bagi peneliti dalam menelaah masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini, dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pikiran baru untuk semua pihak khususnya untuk peneliti sendiri.